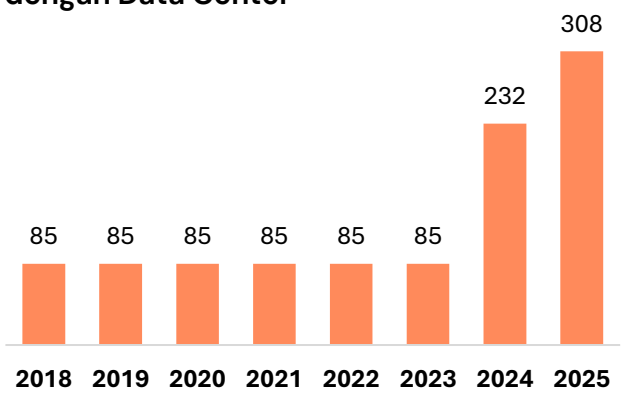
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



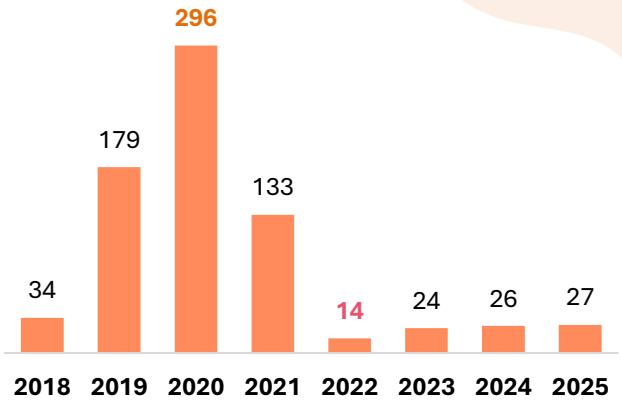
INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018-2025

Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Data Center



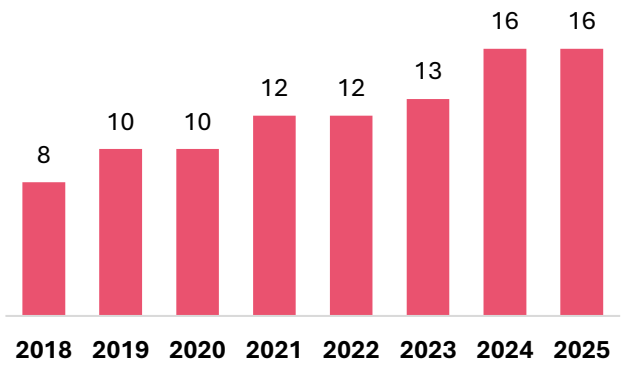
Pada tahun 2024 dan 2025 terjadi lonjakan jumlah perangkat daerah yang terhubung dengan *data center* Kabupaten Purbalingga. Peningkatan tersebut sejalan dengan perluasan konektivitas yang mencakup perangkat daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan.

Jumlah OPD yang Terintegrasi Infrastruktur TIK



Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang difasilitasi jaringan internet mengalami fluktuasi selama 2018–2025. Jumlah tertinggi tercatat pada 2020 sebanyak 296 OPD, sedangkan terendah pada 2022 sebanyak 14 OPD.

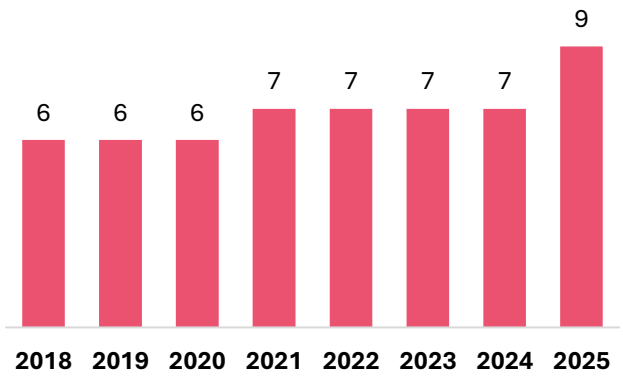
Jumlah Server Milik Kabupaten Purbalingga



Jumlah server milik Kabupaten Purbalingga mengalami tren peningkatan selama 2018–2025. Pada tahun 2025, server tersebut tersebar di beberapa OPD, antara lain Dinkominfo, Dindikbud, Dinarpus, Bapperida dan Bakeuda.



Jumlah Lokasi Yang Terhubung Jaringan Fiber Optik Milik Kabupaten Purbalingga

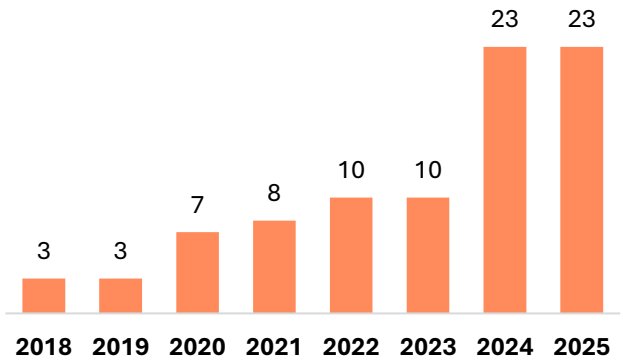


Jumlah lokasi yang terhubung jaringan fiber optik milik Kabupaten Purbalingga menunjukkan tren peningkatan selama 2018–2025, dari 6 lokasi menjadi 9 lokasi. Penambahan jumlah lokasi terhubung menunjukkan perluasan jaringan intranet untuk mendukung konektivitas antarlokasi.



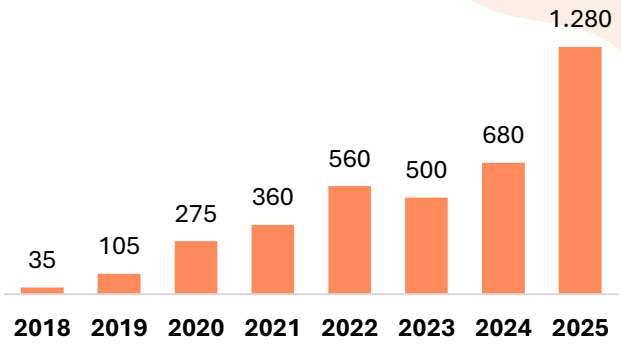
INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018-2025

Jumlah Dokumen Pengelolaan TIK



Jumlah dokumen pengelolaan TIK Kabupaten Purbalingga mengalami tren peningkatan selama 2018–2025, dari 3 dokumen menjadi 23 dokumen. Pada 2025, dokumen pengelolaan TIK terdiri atas 18 Standar Operasional Prosedur (SOP) dan 5 Peraturan Bupati.

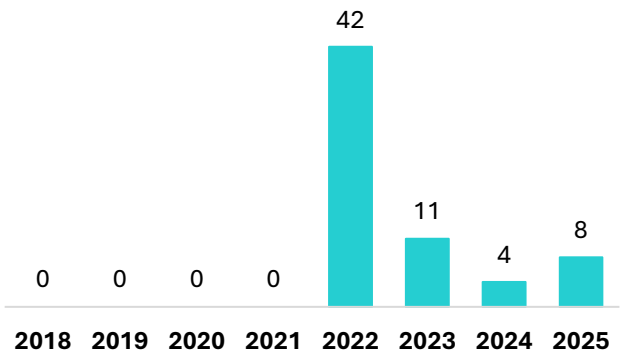
Jumlah Kapasitas Bandwidth yang Tersedia



Jumlah kapasitas *bandwidth* yang tersedia mengalami tren peningkatan selama 2018–2025, dari 35 Mbps menjadi 1.280 Mbps. Pada 2025, kapasitas *bandwidth* terdiri atas ISP utama sebesar 750 Mbps, ISP *backup* 500 Mbps, dan bantuan Diskominfo Jawa Tengah sebesar 30 Mbps.

APLIKASI LAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018-2025

Jumlah Aplikasi Berbagipakai yang Dikembangkan/Dikelola

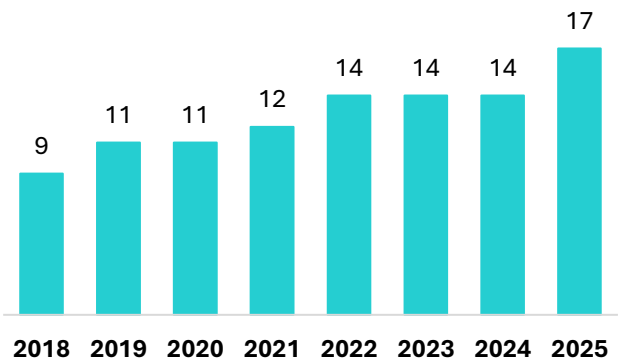


Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan/dikelola Dinkominfo Kabupaten Purbalingga mulai tercatat pada 2022 sebanyak 42 aplikasi. Jumlah tersebut kemudian menurun hingga 4 aplikasi pada 2024, sebelum meningkat menjadi 8 aplikasi pada 2025.





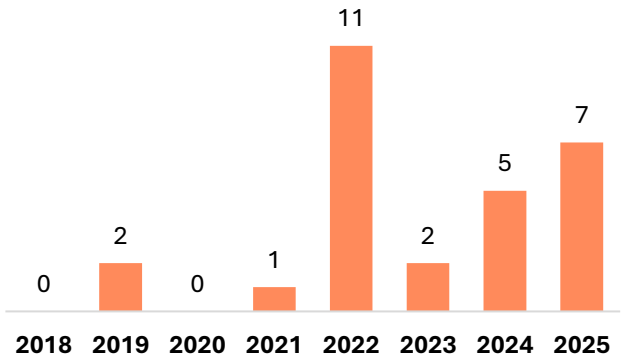
Jumlah Penyelenggara e-government yang Ditingkatkan Kapasitasnya



Jumlah penyelenggara *e-government* yang ditingkatkan kapasitasnya mengalami peningkatan secara bertahap selama 2018-2025.

APLIKASI LAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018-2025

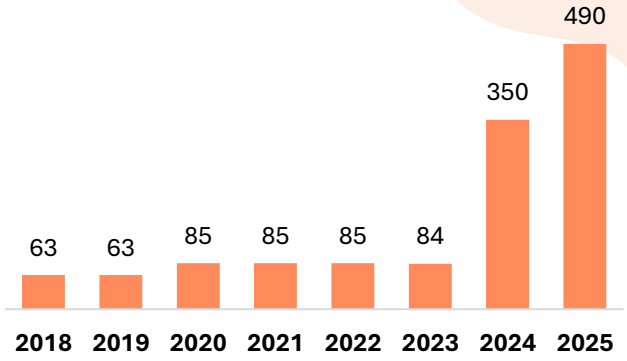
Jumlah Regulasi Aplikasi yang Terbit



Pada tahun 2025 regulasi aplikasi yang terbit di Kabupaten Purbalingga antara lain :

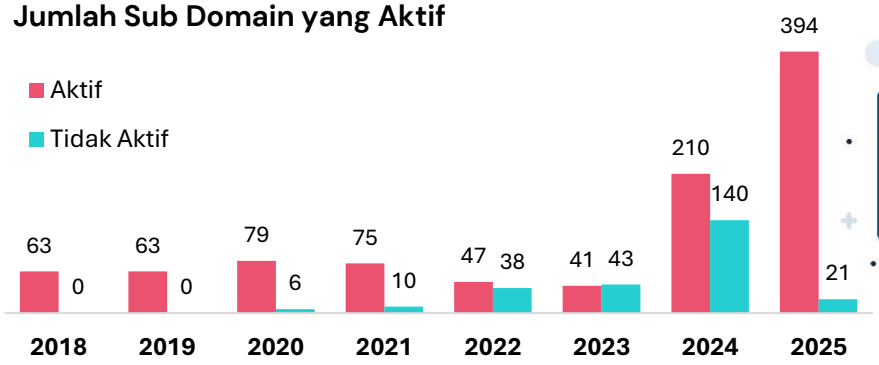
1. SK Aplikasi Dewan Berjalan
2. SK Keamanan Penggunaan API
3. SK SOP Penanganan Aduan Secara Online
4. SK Tim Aplikasi Kepenak Ngodene
5. SK Tim Pengelola Lapor Masbup
6. SK Tim Aplikasi Mata Batin
7. SK Inovasi SAPA Desa

Jumlah Sub Domain (purbalinggakab)



Pada tahun 2025, jumlah sub domain (purbalinggakab) meningkat sebesar 40,00% dibandingkan tahun sebelumnya, dari 350 menjadi 490 sub domain. Jumlah tersebut terdiri atas 116 sub domain website dan 374 sub domain aplikasi, yang digunakan untuk mendukung berbagai layanan dan sistem informasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

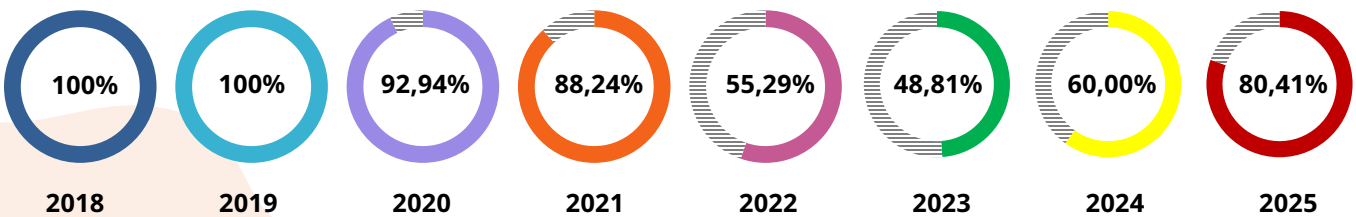
Jumlah Sub Domain yang Aktif





Jumlah sub domain aktif dan tidak aktif mengalami fluktuasi selama 2018–2025. Pada 2025, sub domain aktif meningkat 87,62%, dari 210 menjadi 394 sub domain. Sementara itu, sub domain tidak aktif menurun 85,00%, dari 140 menjadi 21 sub domain. Kondisi ini menunjukkan peningkatan jumlah sub domain yang masih digunakan pada 2025.

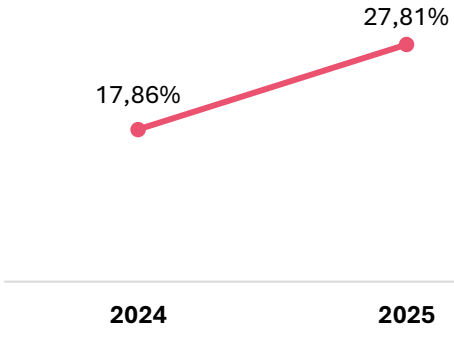
Persentase Sub Domain yang Aktif



Persentase sub domain yang aktif mengalami fluktuasi selama 2018–2025. Pada tahun 2025, persentase sub domain yang aktif meningkat sebesar 20,41% dibandingkan tahun sebelumnya, dari 60,00% menjadi 80,41%.

APLIKASI LAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018-2025

Tingkat Kematangan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi dan Penggunaan Teknologi Baru

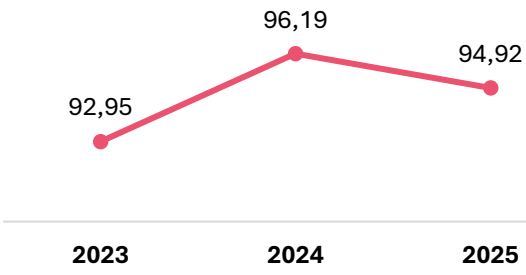




Pada tahun 2025, tingkat kematangan aplikasi Kabupaten Purbalingga mencapai 27,81%, meningkat 9,95 poin persentase dari 17,86% pada 2024, dengan 42 dari 151 aplikasi telah terintegrasi.

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018-2025

Indeks Keterbukaan Informasi Publik



Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah angka yang menggambarkan kondisi keterbukaan informasi publik pada badan publik daerah dan nasional yang dipotret dari tiga dimensi, yang terdiri dari dimensi fisik/politik, dimensi ekonomi, dan dimensi hukum.

Selama tiga tahun terakhir, Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Purbalingga berada pada rentang nilai 92,00–96,00 dengan predikat "Informatif".

Jumlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2018-2025



PPID Pelaksana (OPD)
27 OPD

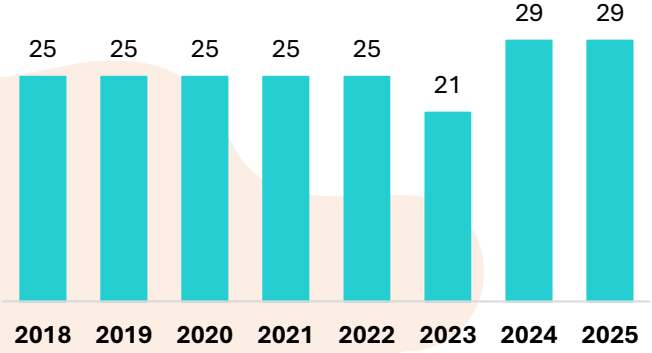
PPID Pelaksana (RSUD)
2 RSUD

PPID Pelaksana (Kecamatan)
18 Kecamatan

PPID Pelaksana (Desa)
224 Desa

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan publik.

Jumlah PPID yang Menyediakan Informasi Publik secara Up to Date

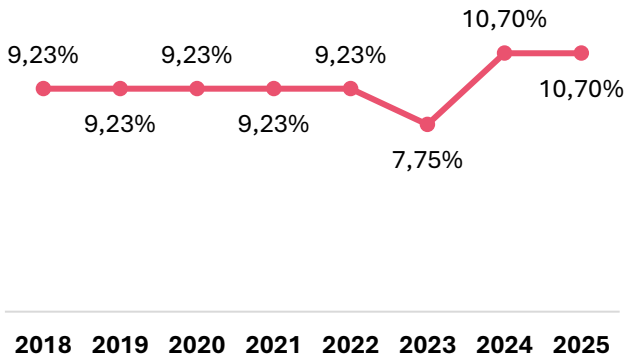


Dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, rata-rata jumlah PPID yang menyediakan informasi publik secara *up to date* sebanyak 26 PPID per tahun.



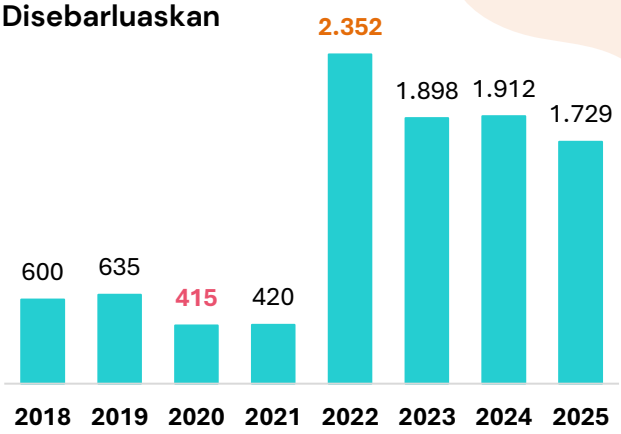
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018-2025

Persentase OPD yang Menyediakan Informasi Publik secara Up to Date di Portal Daerah



Selama 2018–2025, persentase OPD yang menyediakan informasi publik secara *up to date* di Portal Daerah memiliki rata-rata sebesar 9,41% setiap tahunnya.

Jumlah Konten Informasi Publik yang Disebarluaskan



Jumlah publikasi berita dan *flyer* tentang program penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik secara daring maupun luring, selama 2018–2025 mengalami fluktuasi. Jumlah tertinggi tercatat pada 2022 sebanyak 2.352 konten, sedangkan terendah pada 2020 sebanyak 415 konten.

Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang Diberdayakan dan Dikoordinasikan

2018-2025
13 komunitas

Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang diberdayakan dan dikoordikasikan adalah pelibatan komunitas masyarakat dalam mendiseminasi/ publikasi informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.

Jumlah Pelibatan Masyarakat Tradisional dalam Diseminasi Informasi

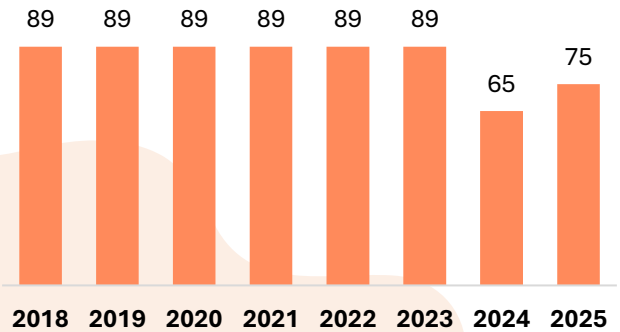


2018-2024
2 komunitas

2025
3 komunitas

1. **Rumah Wayang**
2. **Dresanala**
3. **Larasati**

Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang Dipublikasikan



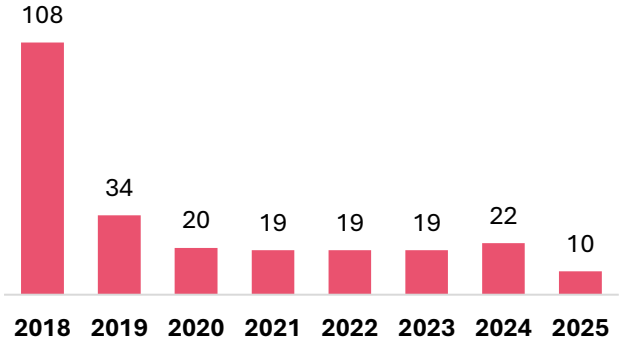
Pada 2019–2023, jumlah DIP yang dipublikasikan stabil pada 89 unit. Pada 2024, jumlah tersebut menurun menjadi 65 unit, kemudian meningkat menjadi 75 unit pada 2025.



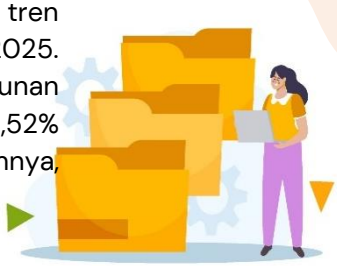
Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan badan publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018-2025

Jumlah Daftar Informasi yang Dikecualikan



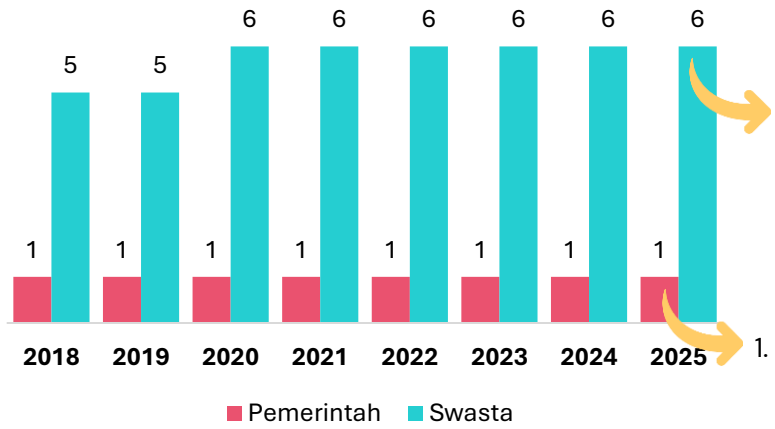
Jumlah daftar informasi yang dikecualikan di Kabupaten Purbalingga mengalami tren penurunan selama 2018–2025. Pada 2019 terjadi penurunan signifikan sebesar 68,52% dibandingkan tahun sebelumnya, dari 108 unit menjadi 34 unit.



Daftar informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena membutuhkan verifikasi tentang urgensi dan sensitivitas informasi.

LAYANAN MEDIA KOMUNIKASI DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018-2025

Jumlah Stasiun Radio

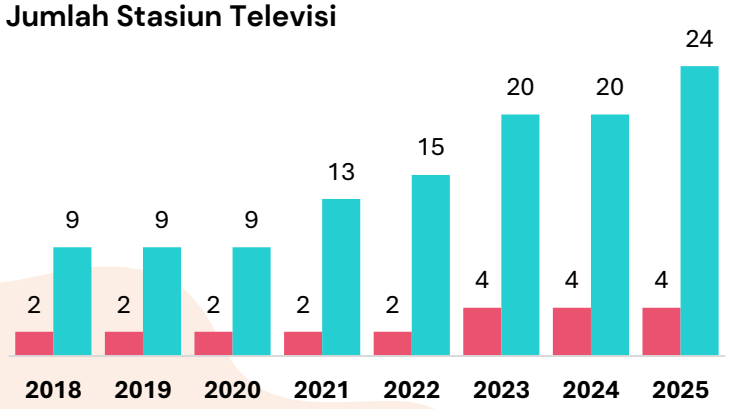


1. Raka FM
2. PT. Radio Gita Nusantara / 99 FM
3. PT. Radio Suara Bralink Sakti / SBS FM
4. Al Manshuroh
5. Radio Fika Insani
6. RadioQU

1. LPPL Gema Soedirman



Jumlah Stasiun Televisi



Jumlah stasiun televisi yang siarannya dapat dinikmati di Kabupaten Purbalingga mengalami tren peningkatan selama 2018–2025, dari 11 stasiun menjadi 28 stasiun. Jumlah tersebut didominasi oleh stasiun televisi swasta, yang meningkat dari 9 stasiun pada 2018 menjadi 24 stasiun pada 2025.



LAYANAN MEDIA KOMUNIKASI DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018-2025

Jumlah Desa Terlayani Layanan Telepon Seluler

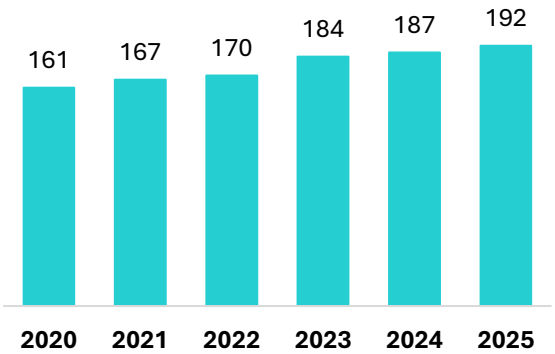
2018-2025
224 desa

Selama 2018-2025, seluruh desa di Kabupaten Purbalingga telah terlayani layanan telepon seluler



Jumlah Base Transceiver Station (BTS)

Base Transceiver Station (BTS) adalah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator.

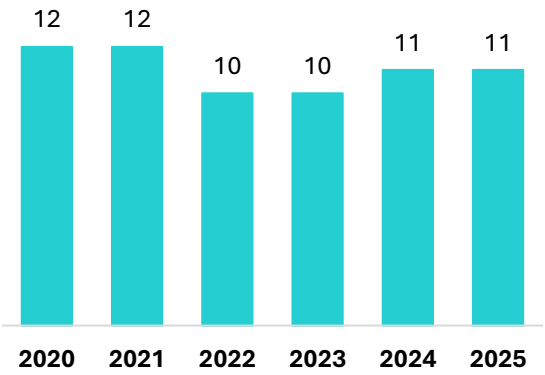


Jumlah BTS di Kabupaten Purbalingga menunjukkan tren peningkatan selama 2020–2025, dari 161 menara pada 2020 menjadi 192 menara pada 2025. Pada 2025, terdapat penambahan 5 menara BTS yang tersebar di Kecamatan Kemangkon, Kalimanah, Kutasari, Bobotsari, dan Kertanegara.





Jumlah Provider



Provider adalah pihak penyelenggara jasa telekomunikasi yang membangun jaringan infrastruktur. Selama periode 2020-2025, rata-rata jumlah provider di Kabupaten Purbalingga mencapai 11 provider per tahunnya.



Jumlah Desa Terlayani Layanan Internet

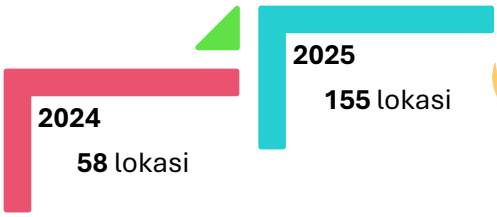
2018-2025
224 desa

Selama 2018-2025, seluruh desa di Kabupaten Purbalingga telah terlayani layanan internet.



LAYANAN MEDIA KOMUNIKASI DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018-2025

Jumlah Sebaran Titik Koordinat Blankspot



Jumlah fasilitas layanan publik yang belum terjangkau atau mengalami keterbatasan akses jaringan telekomunikasi dan/atau internet tercatat mengalami peningkatan pada tahun 2025. Pada tahun tersebut, pendataan dilakukan menggunakan metode survei.



Jumlah Kantor Pos

2018-2025
18 unit

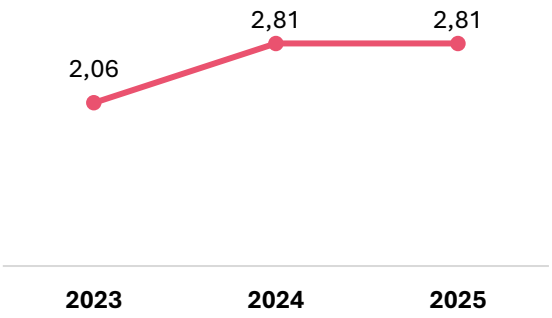


Selama 2018–2025, jumlah kantor pos di Kabupaten Purbalingga mencapai 18 unit, yang terdiri atas 1 unit Kantor Pos Cabang dan 17 unit Kantor Pos Cabang Pembantu.

PENYELENGGARAAN SATU DATA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018-2025

Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral.

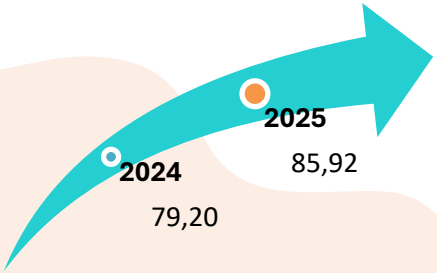


Nilai IPS Kabupaten Purbalingga meningkat 0,75 poin, dari 2,06 pada 2023 menjadi 2,81 pada 2024, dengan kategori meningkat dari Cukup menjadi Baik. Pada 2025 tidak dilakukan penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, sehingga nilai IPS tetap 2,81 (Baik).



Indeks Satu Data Indonesia (SDI)

Indeks Satu Data Indonesia adalah ukuran yang menggambarkan ketercapaian serta memetakan capaian penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di instansi pusat dan pemerintah daerah.

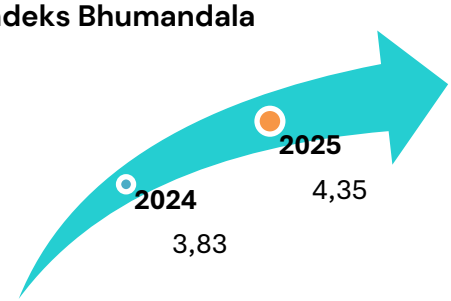


Indeks SDI Kabupaten Purbalingga meningkat 6,72 poin, dari 79,20 pada 2024 menjadi 85,92 pada 2025, dengan capaian yang tetap berada pada kategori Baik.



PENYELENGGARAAN SATU DATA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018-2025

Indeks Bhumandala



Indeks Bhumandala adalah ukuran yang menggambarkan kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, ditinjau dari pemenuhan 5 komponen Infrastruktur Informasi Geospasial yaitu Kebijakan, Kelembagaan, Teknologi, Standar dan Sumber Daya Manusia.

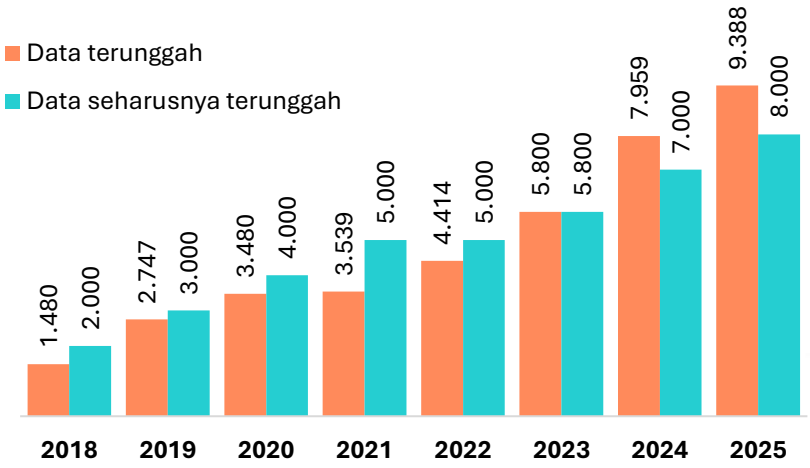
Indeks Bhumandala Kabupaten Purbalingga meningkat 0,52 poin, dari 3,83 pada 2024 menjadi 4,35 pada 2025, dengan predikat meningkat dari Optimal menjadi Unggul.



KETERSEDIAAN DATA STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018-2025

Jumlah Data Statistik Sektoral

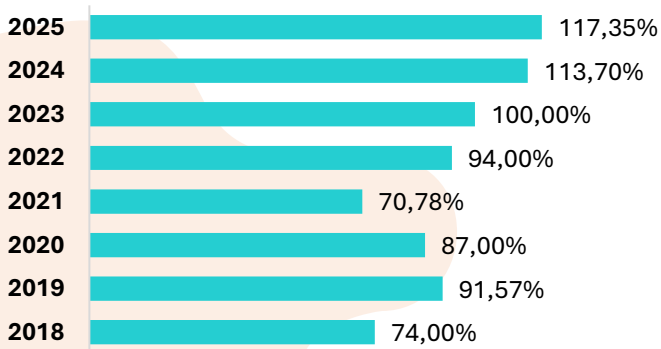
Data yang terunggah adalah data statistik sektoral yang diproduksi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) maupun Instansi Vertikal di Kabupaten Purbalingga yang telah terpublikasi di Portal Satu Data Purbalingga. Data yang seharusnya terunggah adalah data yang seharusnya terpublikasi (target tahunan) pada Portal Satu Data Purbalingga





Jumlah dataset yang terpublikasi pada Portal Satu Data Purbalingga menunjukkan tren peningkatan dari 1.480 dataset pada 2018 menjadi 9.388 dataset pada 2025. Sejak 2023, jumlah dataset yang terpublikasi telah melebihi jumlah data yang seharusnya terpublikasi.

Persentase Ketersediaan Data pada Portal Satu Data Purbalingga



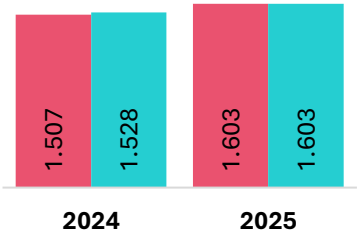
Persentase ketersediaan data pada Portal Satu Data Purbalingga berfluktuasi selama 2018–2025, dari 74,00% menjadi 100,00% pada 2023. Pada 2025, persentase meningkat menjadi 117,35%, melampaui jumlah data yang seharusnya dipublikasikan.

KETERSEDIAAN DATA STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018-2025

Jumlah Data Statistik dan Geospasial

Data statistik dan geospasial yang terverifikasi adalah dataset statistik dan dataset geospasial yang telah melalui proses pemeriksaan, validasi, dan verifikasi sesuai standar dan ketentuan.

Data statistik yang dipublikasikan di Portal Satu Data Purbalingga dan data geospasial yang dipublikasikan di Geoportal adalah dataset statistik dan dataset geospasial yang telah dipublikasikan secara terbuka, dapat diakses publik, serta memenuhi standar keterbukaan data pada platform Satu Data Purbalingga dan Geoportal Daerah.



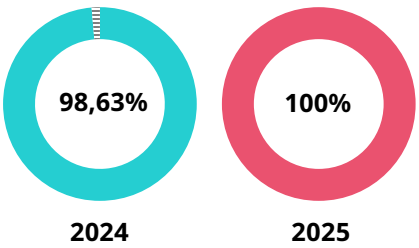
Data statistik dan geospasial yang terverifikasi

Data statistik yang dipublikasikan di Portal Satu Data Purbalingga dan data geospasial yang dipublikasikan di Geoportal



Jumlah data statistik dan geospasial yang dipublikasikan di Kabupaten Purbalingga menunjukkan peningkatan pada periode 2024–2025, dari 1.507 dataset menjadi 1.603 dataset, atau meningkat sebesar 6,37%. Pada 2025, jumlah data yang dipublikasikan telah mencapai 1.603 dataset, sama dengan jumlah data statistik dan geospasial yang terverifikasi.

Persentase Publikasi Data Statistik yang Tersusun (Persentase Data yang Tersedia dan Terverifikasi Sesuai Ketentuan)



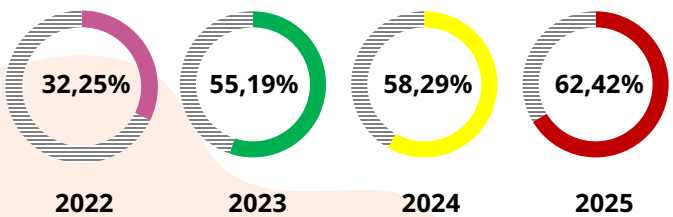
Capaian 100,00% pada 2025 menunjukkan bahwa seluruh data statistik dan geospasial yang terverifikasi telah dipublikasikan pada Portal Satu Data Purbalingga dan Geoportal Purbalingga.



KEAMANAN INFORMASI DAERAH DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018-2025

Tingkat Keamanan Informasi Daerah

Tingkat Keamanan Informasi Daerah didasarkan pada Indeks Keamanan Informasi (KAMI) yang menunjukkan tingkat Kelengkapan dan Kematangan penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001:2013.



Pada 2025, penilaian Tingkat Keamanan Informasi Kabupaten Purbalingga dilakukan secara mandiri menggunakan borang Indeks KAMI versi 5.0, dengan capaian 62,42% (Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar).

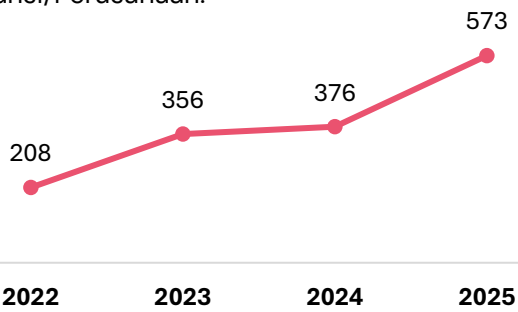




KEAMANAN INFORMASI DAERAH DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018-2025

Indeks Keamanan Informasi

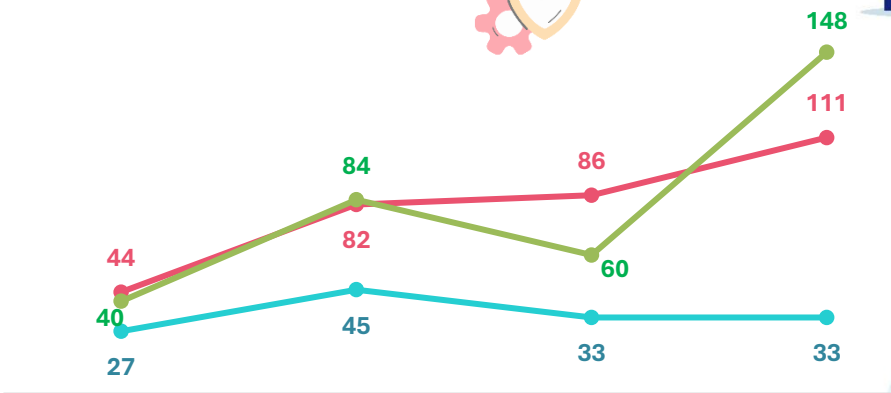
Indeks Keamanan Informasi tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi/Perusahaan.



Indeks KAMI Kabupaten Purbalingga menunjukkan tren peningkatan selama 2022–2025, dari skor 208 pada 2022 menjadi 573 pada 2025. Pada 2022–2023, penilaian dilakukan secara mandiri, pada 2024 dilakukan verifikasi oleh BSSN, sedangkan pada 2025 kembali dilakukan secara mandiri.



Area Indeks Keamanan Informasi





Selama 2022–2025, area Tata Kelola Indeks KAMI mengalami tren peningkatan yang konsisten, sedangkan Pengelolaan Risiko dan Kerangka Kerja Keamanan Informasi mengalami fluktuasi. Pada 2025, Tata Kelola meningkat sebesar 29,07%, Pengelolaan Risiko tetap pada nilai 33, sedangkan Kerangka Kerja Keamanan Informasi meningkat sebesar 146,67% dibandingkan 2024.

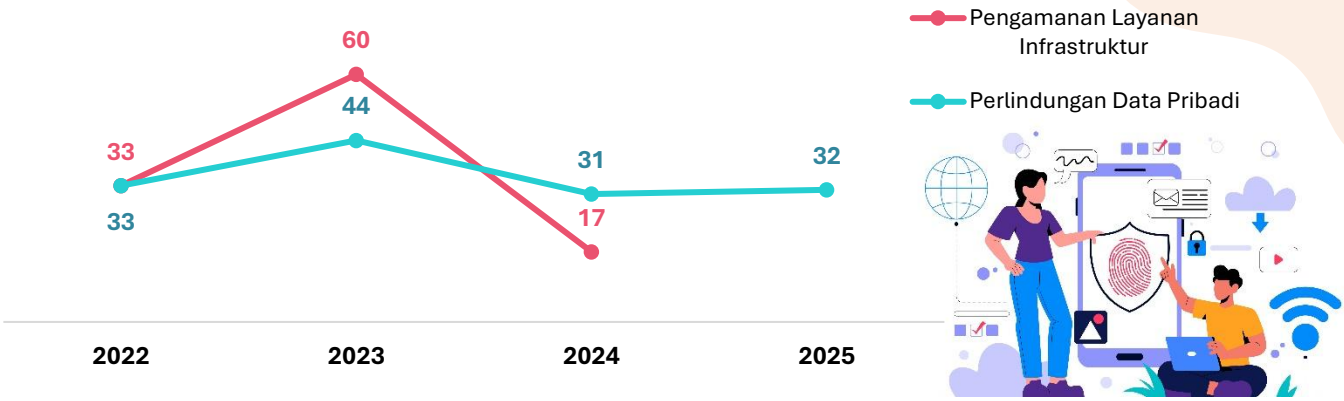




Selama 2022–2025, area Pengelolaan Aset serta Teknologi dan Keamanan Informasi mengalami tren peningkatan, sedangkan Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga mengalami fluktuasi. Pada 2025, Pengelolaan Aset meningkat sebesar 28,21%, Teknologi dan Keamanan Informasi meningkat sebesar 23,75%, sedangkan Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga meningkat sebesar 6,25% dibandingkan 2024.

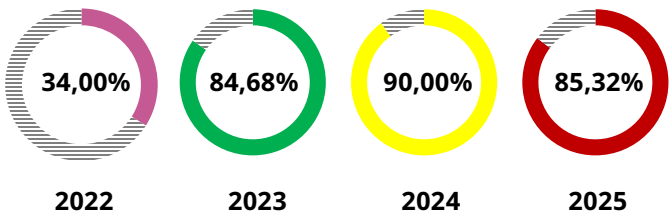
KEAMANAN INFORMASI DAERAH DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018-2025

Area Indeks Keamanan Informasi



Selama 2022–2025, area Pengamanan Layanan Infrastruktur dan Perlindungan Data Pribadi mengalami fluktuasi. Pada 2024, Pengamanan Layanan Infrastruktur menurun sebesar 71,67% dibandingkan 2023 dan tidak lagi menjadi area tersendiri pada 2025 karena terintegrasi ke dalam area Pengelolaan Aset pada Indeks KAMI v5. Sementara itu, Perlindungan Data Pribadi meningkat sebesar 3,23% pada 2025 dibandingkan 2024.

Persentase Pengamanan Informasi Daerah



Persentase Pengamanan Informasi Daerah Kabupaten Purbalingga berdasarkan Instrumentasi Evaluasi Persandian mengalami fluktuasi selama empat tahun terakhir, dengan capaian terendah sebesar 34% pada 2022 dan tertinggi sebesar 90% pada 2024.

LAYANAN PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018-2025

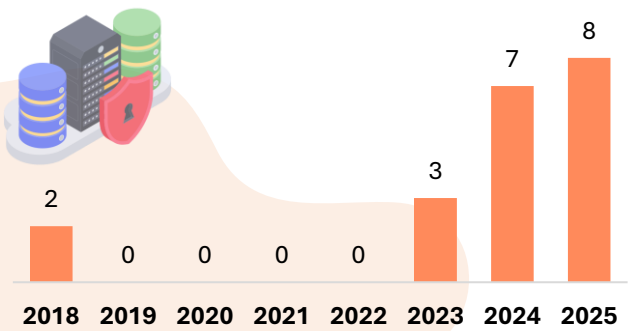
Jumlah Aplikasi



Jumlah aplikasi yang memiliki risiko keamanan tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga meningkat pada 2023, dari 7 aplikasi menjadi 24 aplikasi, seiring dengan bertambahnya jumlah aplikasi yang dikembangkan.



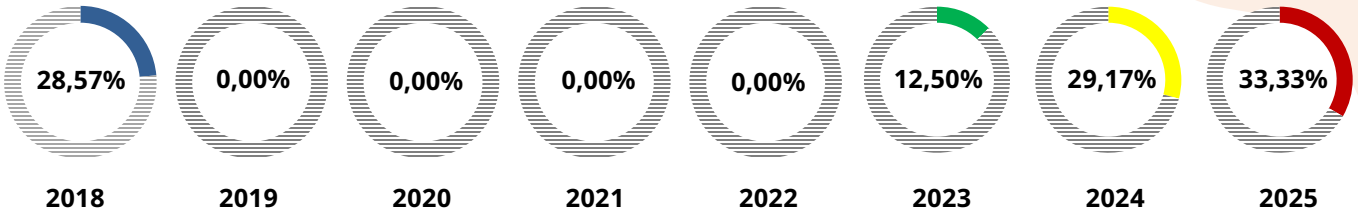
Jumlah Aplikasi yang Diasesmen Keamanan Informasinya



Pada tahun 2025, terdapat penambahan satu aplikasi yang dilakukan asesmen keamanan informasi, yaitu e-kepegawaian, oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui kegiatan Information Technology Security Assessment (ITSA).

LAYANAN PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018-2025

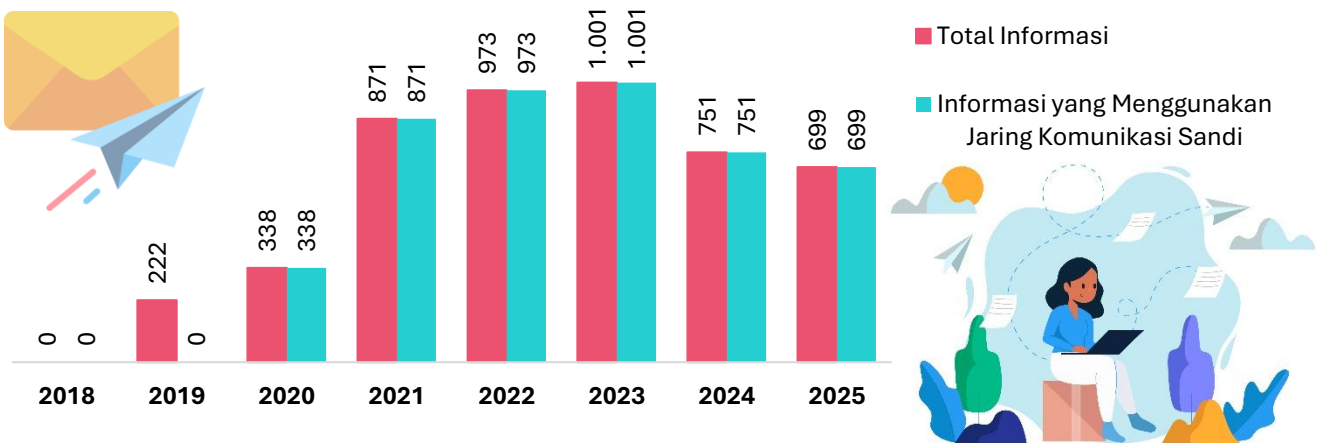
Persentase Jumlah Aplikasi yang Diasesmen Keamanan Informasinya



Persentase jumlah aplikasi yang diasesmen keamanan informasinya mengalami tren peningkatan sejak 2023, yang menunjukkan bertambahnya cakupan aplikasi yang diasesmen.

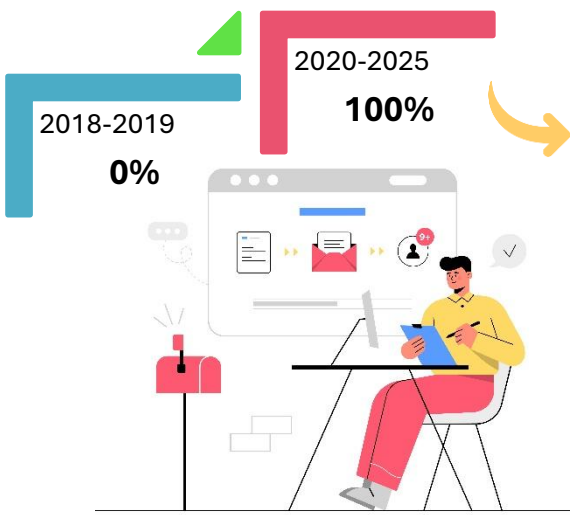
Jumlah Informasi

- Jumlah informasi adalah total surat masuk melewati email sanapati. Email Sanapati merupakan layanan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mendukung pengamanan informasi.
- Jumlah Informasi yang menggunakan Jaring Komunikasi Sandi adalah banyaknya informasi yang didistribusikan ke OPD melalui Jaringan Komunikasi Sandi yang merupakan keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi.



Selama 2018–2025, capaian tertinggi jumlah informasi yang masuk melalui Sanapati terjadi pada 2023 sebanyak 1.001 informasi. Pada 2025 terjadi penurunan sebesar 30,17% menjadi 699 informasi.
Jumlah informasi yang didistribusikan melalui Jaringan Komunikasi Sandi mulai tercatat pada 2020 sebanyak 338 informasi dan mencapai capaian tertinggi pada 2023 sebanyak 1.001 informasi.

Persentase Jumlah Informasi yang Menggunakan Jaring Komunikasi Sandi



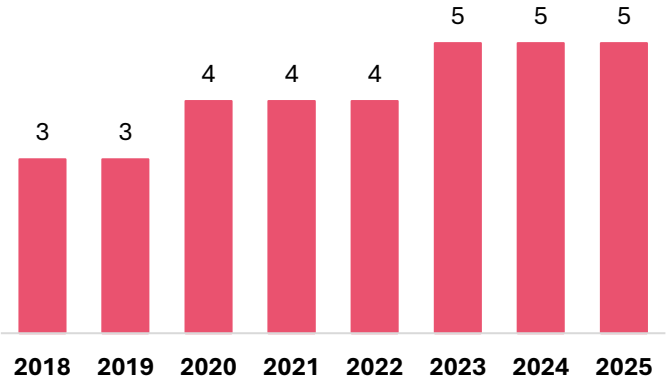
Persentase informasi yang menggunakan Jaringan Komunikasi Sandi meningkat dari 0% pada 2018–2019 menjadi 100% sejak 2020, yang menunjukkan semakin optimalnya pemanfaatan Jaringan Komunikasi Sandi dalam distribusi informasi.



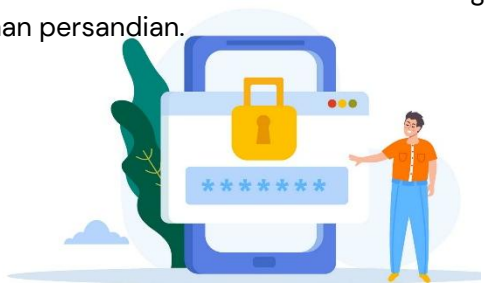
SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA PERSANDIAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018-2025

Jumlah SDM Pengelola Persandian

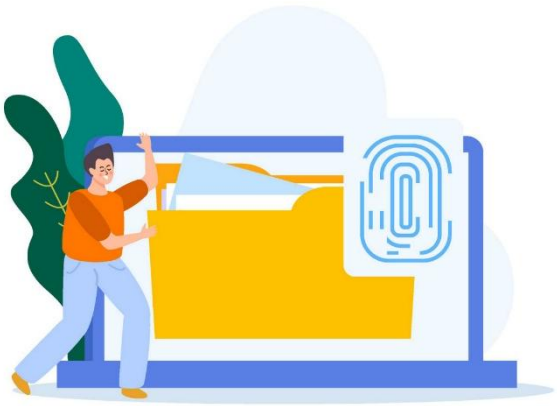
Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Persandian adalah SDM baik Jabatan Fungsional maupun Jabatan Umum yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengamanan informasi, pengamanan siber dan persandian.

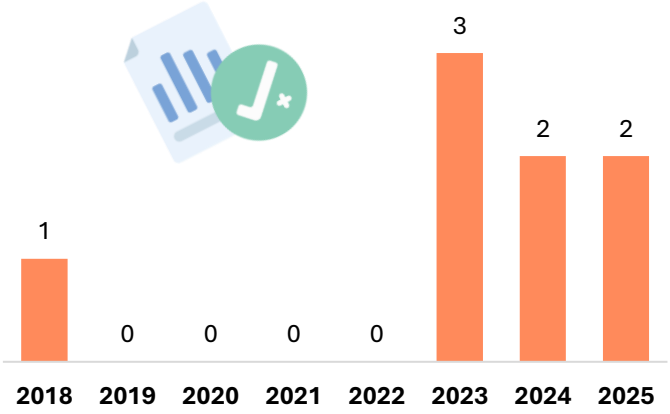


Jumlah SDM Pengelola Persandian meningkat dari 3 orang pada 2018–2019 menjadi 5 orang pada 2023–2025, yang menunjukkan adanya penambahan SDM untuk mendukung pengelolaan persandian.



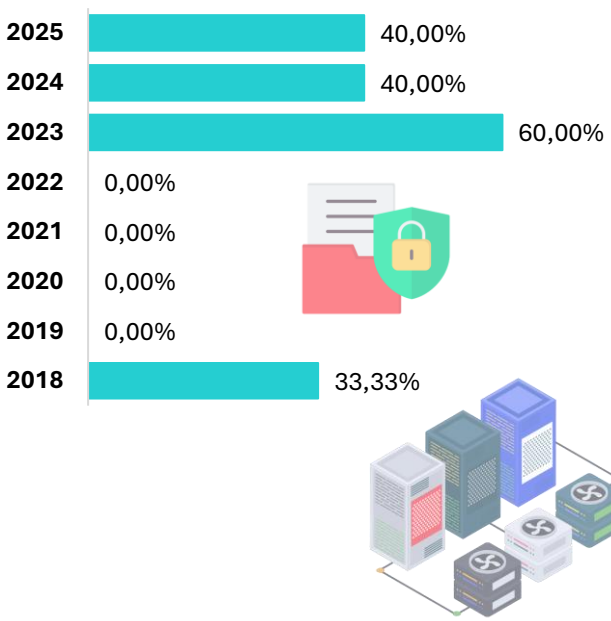
Jumlah SDM Pengelola Persandian yang Ditingkatkan Kapasitasnya





Jumlah SDM Pengelola Persandian yang ditingkatkan kapasitasnya mengalami fluktuasi, dengan capaian tertinggi 3 orang pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi SDM persandian dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan.

Persentase Jumlah Informasi yang Menggunakan Jaring Komunikasi Sandi



Persentase SDM Pengelola Persandian yang ditingkatkan kapasitasnya mengalami fluktuasi, dengan capaian tertinggi 60% pada 2023. Pada 2024–2025, persentasenya berada pada 40%, menunjukkan peningkatan kapasitas SDM dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan.

